



**PENDATAAN KEPENDUDUKAN DESA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT
SEBAGAI UPAYA PENGUATAN ADMINISTRASI DESA UMUTNANA
KABUPATEN MALAKA**

***PUBLIC POPULATION DATA COLLECTION BASED ON COMMUNITY
PARTICIPATION AS AN EFFORT TO STRENGTHEN THE ADMINISTRATION OF
UMUTNANA VILLAGE, MALAKA REGENCY***

Egidius Fkun^{1*}, Ahariana Rihi², Januaria B. Naitili³,

Valeria M. Wangga⁴ Arnoldino Taek⁵, Filipus B. Jehatut⁶

^{1,2,3,4} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia

^{5,6}Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia

*email egifikun6@gmail.com

Abstrak: Permasalahan utama pengelolaan data kependudukan di tingkat desa masih ditandai oleh rendahnya akurasi data, keterbatasan kapasitas administrasi, serta minimnya partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya perencanaan pembangunan dan kualitas pelayanan publik desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk menyusun basis data kependudukan yang akurat dan mutakhir di Desa Umutnana, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, sekaligus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif berbasis riset dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan mahasiswa melalui pendataan *door to door*, observasi lapangan, wawancara, serta verifikasi dokumen kependudukan. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan kondisi kependudukan dan hambatan administratif. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sebelum kegiatan PKM, data kependudukan desa belum mutakhir, terdapat duplikasi data, serta kepemilikan dokumen kependudukan yang belum merata. Setelah pendataan dilakukan, tersusun basis data kependudukan yang lebih valid dan terjadi peningkatan partisipasi serta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis *evidence-based*. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa pendataan kependudukan berbasis partisipasi masyarakat efektif dalam memperbaiki kualitas administrasi desa dan mendukung penguatan tata kelola pembangunan desa.

Kata Kunci: Pendataan kependudukan; partisipasi masyarakat; pengabdian kepada masyarakat.

Abstract: (*Low data accuracy, poor administrative capability, and low community participation remain the fundamental challenges of village population data management. Development planning and village public services are hampered by this. This Community Service Activity (PKM) seeks to build an accurate and up-to-date demographic database in Umutnana Village, Sasitamean District, Malaka Regency, and raise community awareness and participation in population administration. The research-based participatory strategy involves village government, community members, and students in door-to-door data gathering, field observations, interviews, and population document verification. Quantitative and qualitative data were studied to describe demographic conditions and administrative impediments. The community service found that the village's demographic data was outdated and duplicated, and ownership of population papers was uneven before the PKM activity. After data collection, a more valid demographic database is created, and community engagement and awareness of population statistics as a basis for evidence-based development planning increase. This activity shows that community-based demographic data collection improves village administration and development governance.*

Keywords: Community participation, community service, and population data collecting

Article History:

Received	Revised	Published
22 November 2025	10 Januari 2026	15 Januari 2026

Pendahuluan

Data kependudukan merupakan komponen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik. Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan memungkinkan pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan berkeadilan, sedangkan data yang tidak valid berpotensi menimbulkan kesalahan kebijakan, inefisiensi anggaran, serta ketimpangan pelayanan publik (Dwiyanto, 2018; Badan Pusat Statistik [BPS], 2022). Dalam konteks pemerintahan desa, data kependudukan tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga nilai strategis sebagai fondasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Namun demikian, pada level desa—terutama di wilayah perdesaan dan wilayah perbatasan—pengelolaan data kependudukan masih menghadapi berbagai permasalahan struktural. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya literasi administrasi masyarakat, serta belum optimalnya sistem pendataan menyebabkan data kependudukan sering kali tidak mutakhir, mengandung duplikasi, dan tidak mencerminkan kondisi demografis yang sebenarnya (Sutiyo & Maharjan, 2017). Situasi ini berdampak langsung pada lemahnya perencanaan pembangunan desa dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

Kondisi empiris tersebut secara nyata ditemukan di Desa Umutnana, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Berdasarkan hasil pengamatan awal di lapangan dan koordinasi dengan pemerintah desa, diketahui bahwa data kependudukan Desa Umutnana belum diperbarui secara berkala. Arsip administrasi desa masih mencatat warga yang telah meninggal dunia atau berpindah domisili, sementara sebagian warga baru, termasuk anak-anak yang lahir dalam beberapa tahun terakhir, belum seluruhnya tercatat dalam data resmi desa. Selain itu, ditemukan kasus data ganda pada tingkat kepala keluarga yang menunjukkan lemahnya mekanisme pencatatan dan verifikasi data kependudukan.

Permasalahan tersebut diperparah oleh rendahnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Sebagian masyarakat Desa Umutnana, khususnya kelompok lansia dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, belum memiliki kesadaran yang memadai mengenai pentingnya dokumen kependudukan sebagai prasyarat utama untuk mengakses layanan publik. Faktor geografis, keterbatasan akses menuju pusat pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kabupaten, serta minimnya pendampingan administratif turut memperkuat persoalan tersebut. Dampaknya, masyarakat mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta program-program pembangunan lainnya.

Secara normatif, pentingnya administrasi dan data kependudukan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang akurat dan mutakhir. Namun, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara kerangka normatif kebijakan tersebut dan realitas empiris pengelolaan data kependudukan di tingkat desa, khususnya di Desa Umutnana. Berbagai kegiatan pendataan yang dilakukan sebelumnya cenderung bersifat administratif, top-down, dan tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara langsung. Pendataan sering kali

hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan program tertentu, tanpa mekanisme pemutakhiran berkelanjutan dan tanpa proses verifikasi lapangan yang memadai. Akibatnya, data kependudukan desa menjadi statis, tidak responsif terhadap dinamika sosial, dan kurang dimanfaatkan sebagai basis perencanaan pembangunan.

Selain itu, meskipun sejumlah penelitian dan program pengabdian telah membahas administrasi kependudukan dan pembangunan desa, sebagian besar masih berfokus pada aspek kebijakan atau digitalisasi sistem secara umum, tanpa mengeksplorasi secara mendalam praktik pendataan partisipatif berbasis komunitas di desa-desa dengan keterbatasan infrastruktur dan kapasitas administrasi. Kesenjangan inilah yang menunjukkan perlunya intervensi solutif melalui pengabdian berbasis riset yang tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat dan kapasitas kelembagaan desa dalam pengelolaan data kependudukan.

Literatur menunjukkan bahwa data kependudukan yang berkualitas merupakan prasyarat utama pembangunan berbasis bukti (*evidence-based development*). Dwiyanto (2018) menegaskan bahwa kebijakan publik yang efektif harus ditopang oleh data yang akurat dan dapat diverifikasi. Dalam konteks pembangunan desa, Dwipayana dan Eko (2018) menekankan pentingnya desa membangun sistem data sendiri yang bersumber dari kondisi riil masyarakat agar pembangunan tidak bersifat elitis dan administratif semata.

Penelitian lain menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam pendataan mampu meningkatkan akurasi data sekaligus memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap proses pembangunan (Cohen & Uphoff, 1980). Pendataan berbasis komunitas juga dinilai efektif dalam menjangkau kelompok rentan yang sering terlewatkan dalam pendataan formal (World Bank, 2018). Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berada pada ranah konseptual atau studi kebijakan, sementara praktik pengabdian berbasis riset yang mengintegrasikan pendataan partisipatif, keterlibatan mahasiswa, dan penguatan administrasi desa pada konteks desa perbatasan masih relatif terbatas.

Berdasarkan kajian tersebut, kebaruan (*novelty*) dari kegiatan pengabdian ini terletak pada penerapan pendataan kependudukan secara partisipatif dan berbasis riset di Desa Umutnana, yang tidak hanya berorientasi pada pengumpulan data, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat, validasi data secara langsung di lapangan, serta perumusan rekomendasi kelembagaan berupa pembentukan tim data desa untuk keberlanjutan pemutakhiran data.

Berdasarkan latar belakang empiris, kesenjangan praktik, dan kajian literatur yang telah dipaparkan, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk:

- (1) menyusun basis data kependudukan Desa Umutnana yang akurat, mutakhir, dan tervalidasi melalui pendataan partisipatif berbasis riset;
- (2) mendukung perbaikan sistem administrasi kependudukan desa sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- (3) meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa Umutnana terhadap pentingnya administrasi kependudukan; serta
- (4) memberikan pengalaman pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa dalam penerapan teori administrasi publik dan pembangunan desa.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan normatif kebijakan dan realitas empiris di tingkat desa, sekaligus berkontribusi pada penguatan tata kelola pembangunan desa berbasis data dan partisipasi masyarakat.

Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di Desa Umutnana,

Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Juli–Agustus 2025 dengan menjangkau seluruh wilayah dusun. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif, yang menempatkan masyarakat dan perangkat desa sebagai subjek aktif dalam proses pendataan administrasi kependudukan. Pendekatan ini dipilih karena efektif meningkatkan akurasi data sekaligus memperkuat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian persoalan publik di tingkat lokal (Cohen & Uphoff, 1980; Chambers, 1994).

Sasaran kegiatan adalah seluruh kepala keluarga di Desa Umutnana, dengan Pemerintah Desa, kepala dusun, RT/RW, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sebagai mitra pelaksana. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan kepala keluarga dan perangkat desa, dokumentasi arsip kependudukan, serta pendataan door to door oleh mahasiswa sebagai enumerator. Penggunaan berbagai teknik ini dimaksudkan untuk menjamin validitas data melalui triangulasi sumber dan metode (Denzin, 2012).

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk menyusun profil kependudukan desa dan secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi hambatan administratif serta tingkat partisipasi masyarakat. Hasil analisis menjadi dasar perumusan rekomendasi perbaikan tata kelola administrasi kependudukan di Desa Umutnana secara berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa pendataan penduduk di Desa Umutnana menghasilkan sejumlah temuan empiris yang menggambarkan kondisi aktual administrasi kependudukan desa. Desa Umutnana merupakan salah satu dari sembilan desa di Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, dengan jumlah 217 kepala keluarga dan total penduduk sebanyak 750 jiwa. Secara administratif, desa ini terbagi ke dalam tujuh dusun, tujuh RW, dan tujuh RT. Struktur wilayah administratif yang relatif sederhana ini seharusnya memungkinkan pengelolaan data kependudukan secara tertib, namun kondisi lapangan menunjukkan sebaliknya.

Sebelum kegiatan PKM dilaksanakan, data kependudukan Desa Umutnana belum tersusun secara mutakhir dan valid. Ditemukan ketidaksesuaian antara data arsip desa dengan kondisi riil di lapangan, seperti warga yang telah berpindah domisili tetapi masih tercatat sebagai penduduk aktif, serta warga baru yang belum terakomodasi dalam data resmi desa. Selain itu, kepemilikan dokumen kependudukan dasar—terutama KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran—masih tergolong rendah pada sebagian masyarakat. Kondisi ini berdampak langsung pada pelayanan administrasi, penyaluran bantuan sosial, dan perencanaan pembangunan desa.

Tabel 1. Gambaran Umum Kependudukan Desa Umutnana

Indikator	Keterangan
Jumlah Kepala Keluarga	217 KK
Jumlah Penduduk	750 jiwa
Jumlah Dusun	7
Jumlah RW	7
Jumlah RT	7

Sumber: Desa Umutnana, 2025

Hasil pendataan menunjukkan bahwa persoalan utama administrasi kependudukan di Desa Umutnana tidak hanya terletak pada ketidadaan data, tetapi juga pada kualitas dan akurasi data yang tersedia. Data yang belum diperbarui secara berkala menyebabkan terjadinya duplikasi dan ketidaktepatan sasaran dalam berbagai program desa. Kondisi ini diperparah oleh belum tersedianya sistem digital pengelolaan data, sehingga seluruh pencatatan masih dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan.

Tabel 2. Kondisi Administrasi Kependudukan Desa Umutnana

Aspek	Kondisi Sebelum PKM
Validitas data	Belum mutakhir dan tidak sepenuhnya sesuai kondisi riil
Kepemilikan dokumen	Sebagian warga belum memiliki dokumen lengkap
Sistem pengelolaan data	Manual
Partisipasi masyarakat	Relatif rendah

Sumber: Desa Umutnana, 2025

Setelah kegiatan pendataan dan sosialisasi dilakukan, terjadi peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengumpulan data. Warga menjadi lebih terbuka dalam memberikan informasi kependudukan dan mulai memahami pentingnya dokumen kependudukan sebagai syarat dasar dalam memperoleh pelayanan publik dan akses program pembangunan. Hasil utama dari kegiatan PKM ini adalah tersusunnya basis data kependudukan terbaru yang lebih valid serta profil kependudukan desa yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Pembahasan

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendataan kependudukan berbasis partisipasi masyarakat merupakan pendekatan yang efektif untuk memperbaiki kualitas administrasi kependudukan di tingkat desa. Data kependudukan yang valid dan mutakhir menjadi prasyarat utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa data kependudukan merupakan dasar dalam pemberian pelayanan administratif dan perlindungan hak-hak sipil warga negara.

Temuan dalam kegiatan PKM ini memperkuat pandangan bahwa permasalahan administrasi kependudukan di desa bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan regulasi, melainkan oleh lemahnya kapasitas pengelolaan data dan rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa ketidakakuratan data di tingkat lokal sering disebabkan oleh minimnya pemutakhiran data dan rendahnya partisipasi warga dalam proses pendataan (BPS, 2020).

Dari perspektif perencanaan pembangunan, tersedianya data kependudukan yang lebih akurat memberikan kontribusi signifikan terhadap penyusunan dokumen perencanaan desa, khususnya RPJMDes dan RKPDes. Data mengenai jumlah penduduk, struktur umur, dan kondisi sosial dasar memungkinkan pemerintah desa menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *evidence-based planning*, yang menempatkan data empiris sebagai landasan utama pengambilan keputusan pembangunan (Todaro & Smith, 2015).

Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat selama kegiatan PKM menunjukkan adanya perubahan cara pandang warga terhadap administrasi kependudukan. Masyarakat tidak lagi memandang pendataan sebagai aktivitas administratif semata, tetapi sebagai bagian

dari proses pembangunan desa yang membutuhkan keterlibatan bersama. Temuan ini menguatkan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1980), bahwa keberhasilan program pembangunan di tingkat lokal sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terbukanya peluang penguatan kapasitas kelembagaan desa melalui rekomendasi pembentukan tim data desa. Keberadaan tim ini diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pemutakhiran data meskipun desa belum memiliki sistem digital. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan lokal, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan merupakan langkah strategis menuju tata kelola desa yang akuntabel dan berkelanjutan (UNDP, 2009).

Dengan demikian, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa tujuan PKM telah tercapai, yakni memperbaiki administrasi kependudukan desa, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta menyediakan basis data yang dapat mendukung perencanaan pembangunan desa secara lebih akurat. Pengabdian berbasis riset ini tidak hanya menghasilkan keluaran jangka pendek berupa data kependudukan, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dalam bentuk penguatan tata kelola desa berbasis data.





Gambar 1. Pendataan penduduk

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berbasis pendataan kependudukan di Desa Umutnana memberikan kontribusi penting dalam memperbaiki kualitas administrasi kependudukan desa. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini menghasilkan data penduduk yang lebih akurat dan mutakhir serta meningkatkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat mengenai pentingnya data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. PKM ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola desa dapat dimulai dari perbaikan praktik pendataan yang sederhana namun sistematis dan berbasis keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka Pemerintah Desa Umutnana disarankan untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan secara berkala dan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pembangunan desa. Ke depan, kegiatan pengabdian serupa perlu dikembangkan dengan dukungan sistem pengelolaan data yang lebih berkelanjutan serta dikaitkan dengan isu pembangunan strategis desa agar data kependudukan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pembangunan berbasis bukti.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Umutnana, khususnya Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa, atas dukungan dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat Desa Umutnana yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan data serta informasi yang diperlukan. Selain itu, penulis mengapresiasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor (FISIPOL UNIMOR) yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, sehingga program ini dapat terlaksana dan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik kependudukan Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Data kependudukan dan pembangunan nasional*. Jakarta: BPS.
- Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2006). Local capacity, village governance, and the political economy of rural development in Indonesia. *World Development*, 34(11), 1958–1976. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.11.025>
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World*

- Development*, 22(9), 1253–1268. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Denzin, N. K. (2012). *Triangulation 2.0. Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88. <https://doi.org/10.1177/1558689812437186>
- Dwipayana, A., & Eko, S. (2018). *Membangun kedaulatan desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mikkelsen, B. (2005). *Methods for development work and research: A new guide for practitioners* (2nd ed.). New Delhi: Sage Publications.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). Community participation and rural development in Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 54, 224–236. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.06.002>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). New York, NY: Pearson Education.
- UNDP. (2009). *Capacity development: A UNDP primer*. New York, NY: United Nations Development Programme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- World Bank. (2018). *Community-driven development: Results and lessons learned*. Washington, DC: World Bank.